

TREND KORUPSI SEMESTER I/2007
(Januari-Juni 2007)

Korupsi Sektor Perbankan: Penyumbang Kerugian
Negara Terbesar

IC W, 2007

Skema Penyajian

- Latar belakang: Mengapa perlu melakukan Analisis Trend Korupsi ?
- Analisis Tren Korupsi : Tujuan, Konsep dan Definisi
- Metodologi
- Hasil dan Analisis :
 - Pengungkapan kasus korupsi
 - Analisis trend pengungkapan kasus korupsi
 - Analisis penanganan kasus korupsi
- Kesimpulan dan Rekomendasi

Latar Belakang

- Permasalahan : Sedikit ukuran perkembangan praktek korupsi yang tersedia, sehingga sulit untuk menilai dan mengevaluasi dampak dari upaya pemberantasan korupsi. Parameter sederhananya adalah, apakah kasus korupsi semakin berkurang, meningkat atau tetap tidak ada perubahan ?

[Menu](#)

Tujuan ATK (Analisis Trend Korupsi)

- Apa yang dimaksud dengan Analisis Trend Korupsi ?
" Analisis perkembangan atas pengungkapan dan penanganan kasus korupsi secara periodik "
- ATK bertujuan untuk :
 - Mengetahui potensi, struktur, perubahan dan perkembangan korupsi yang terjadi secara makro
 - Alternatif ukuran dan evaluasi atas metode dan usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan.
- **Contoh**, kasus korupsi yang terungkap dan ditangani oleh aparat penegak hukum selama ini cenderung mudah ditangani bersifat dan konvensional. Masih banyak praktek korupsi yang terjadi dan luput dari upaya pemberantasan korupsi.

[Menu](#)

Definisi Kasus Korupsi Baru dan Lama

- Kasus Korupsi
 - Kasus dugaan korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Timastipikor) dan telah ditetapkan tersangka.
- Kasus Korupsi Baru
 - Kasus korupsi yang tersangkanya baru ditetapkan oleh aparat penegak hukum dalam periode pemantauan.
 - Contoh : penetapan kasus dugaan korupsi PT. Telkom Divre Makassar
- Periode Pemantauan Semester I 2007 :
 - 1 Januari 2007 – 30 Juni 2007

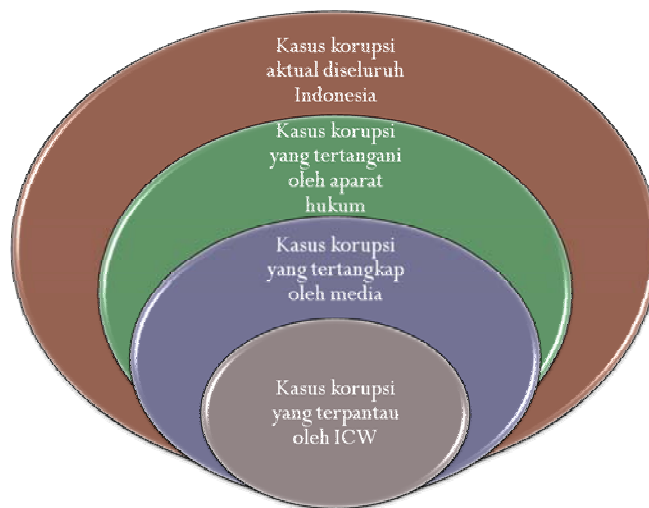
Metodologi

- **Sumber Data** : pemberitaan kasus-kasus korupsi seluruh Indonesia di media cetak, on-line, elektronik dsb.
- Banyak media yang dijadikan sumber : 26 Media Nasional dan 54 Media Lokal.
- Metode pengumpulan data : "*day to day monitoring*" terhadap pemberitaan korupsi.
- Pengolahan data menggunakan microsoft excel dan perangkat lunak statistik SPSS.

Metodologi

- Metode ini dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Sangat sulit mendapatkan data keseluruhan kasus korupsi aktual yang terjadi di seluruh Indonesia.
 - Data berbasis media memiliki validitas yang dapat diandalkan mengingat pers dapat memberitakan perkembangan pemberitaan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum. Unit analisisnya adalah kasus korupsi.

Sumber Data Analisis Trend Korupsi



•Tidak semua kasus korupsi aktual diseluruh Indonesia tertangani aparat hukum

•Tidak semua kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum termuat oleh media

•Tidak semua kasus korupsi yang termuat di media terpantau oleh ICW

Metodologi

- Variabel yang digunakan : Tahun terjadi dan terungkap, sektor, modus, lokasi, lembaga tempat terjadi korupsi, pelaku dan jabatan tersangka kasus korupsi, status hukum pelaku, vonis dan sanksi hukum
- Definisi Kasus Korupsi : Dugaan korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum (KPK, Kepolisian dan Kejaksaan) dan telah ada penetapan sebagai tersangka (penyidikan).

[Menu](#)

Metodologi

- Analisis yang digunakan dalam report ini adalah analisis deskriptif (frekuensi dan tabulasi silang) dan analisis perbandingan untuk isu sebagai berikut :
 - Pengungkapan Kasus Korupsi Satu Semester
 - Trend Kasus Korupsi
 - Profil Kasus Korupsi Dalam Proses Hukum

Hasil Pemantauan Dan Analisis

- [Pengungkapan Kasus Korupsi Semester I 2007](#)
- [Analisis Trend Kasus Korupsi Semester I 2007](#)
- Analisis Profil Kasus Korupsi Semester I 2007
yang ditangani aparat penegak hukum

Pengungkapan Kasus Korupsi

Pengungkapan Kasus Korupsi Semester I 2007

Hasil Pemantauan



51 Kasus Korupsi Baru Yang Terungkap Pada Semester I 2007

Rata-rata waktu pengungkapan : 2,5 tahun

Kerugian Negara : Rp 665,8 miliar

Modus terbanyak : Mark-up 20 kasus (39.22%)

Jumlah Pelaku : 102 orang

2 Sektor Terbanyak :

Pemerintah Pusat dan Daerah : 7 kasus

Sosial Kemasyarakatan (dana bantuan) : 7 kasus

Ditemukan 51 Kasus Korupsi Baru Yang Terungkap Pada Semester I 2007 dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 665,8 miliar

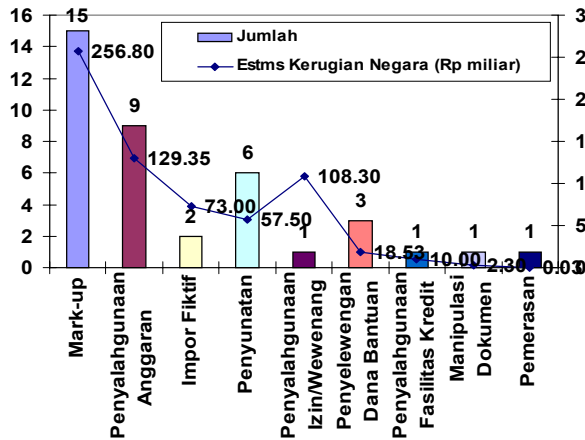
- Jumlah kasus baru ini sangat sedikit sekali, jika dibandingkan dengan temuan BPK mengenai kerugian negara. Dalam Hapsem Semester II 2006 dilaporkan terjadi 5.776 kasus dengan kerugian negara mencapai Rp 13.3 triliun
- Hal ini menunjukkan kinerja aparat penegak hukum "rendah". Mengingat potensi terjadinya korupsi sudah terlihat dari hasil audit BPK. Seharusnya, aparat hukum dapat dengan mudah menindaklanjuti temuan audit BPK.

Waktu Pengungkapan Kasus Korupsi Baru : 2,5 tahun

→ Kinerja aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah perkara korupsi sangat mengecewakan. Jika mengacu pada Standar Kinerja Kejaksaan, Kejati harus menyelesaikan 5 perkara/tahun, Kejari Type A 3 perkara, Kejari Type B 2 perkara dan Kejari Type C 1 perkara

- Idealnya → waktu pengungkapan kasus korupsi (korupsi terjadi → penetapan tersangka) adalah 1 sampai 1,5 tahun. Hal ini didasarkan pada audit BPK yang dipublikasikan setahun setelah program pemerintah berjalan.

Modus Kasus Korupsi Baru Menurut Jumlah dan Estimasi Kerugian Negara

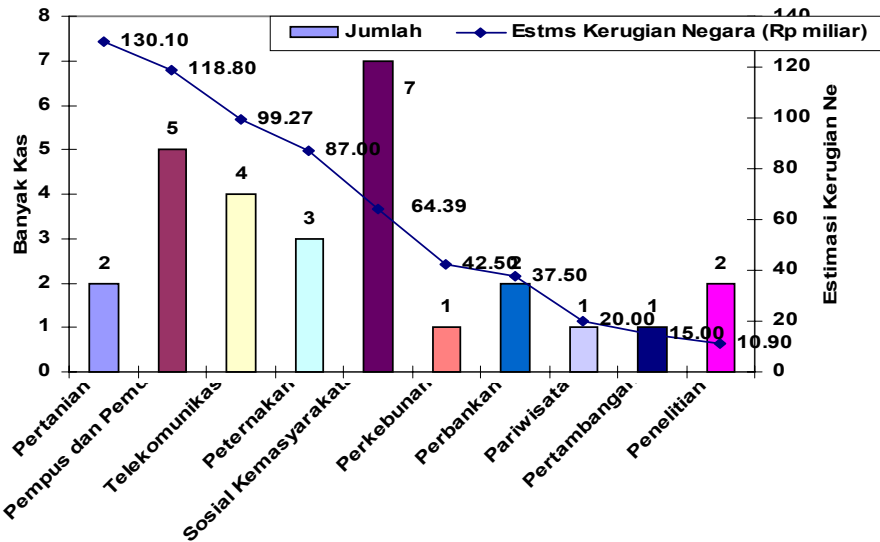


Modus terbanyak → mark-up.

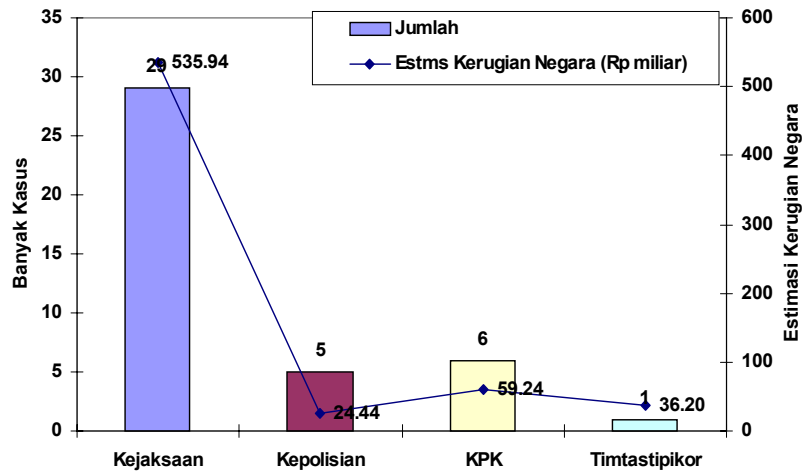
“Artinya, yang ditangani adalah kasus korupsi konvensional”

“Sangat sedikit kasus korupsi dengan modus yang canggih, dengan kerugian negara besar serta melibatkan elit politik, pengusaha kakap terungkap”..

Sektor Kasus Korupsi Baru Menurut Jumlah dan Estimasi Kerugian Negara



Kasus Korupsi Baru Yang Ditangani Aparat Penegak Hukum Menurut Jumlah dan Estimasi Kerugian Negara



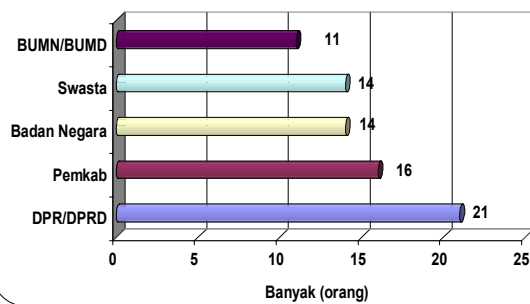
Kasus Korupsi Menurut Pelaku & Lembaga Asal

102 tersangka kasus korupsi baru

Lembaga Penyumbang Tersangka Korupsi Terbesar

Jabatan Tertinggi :

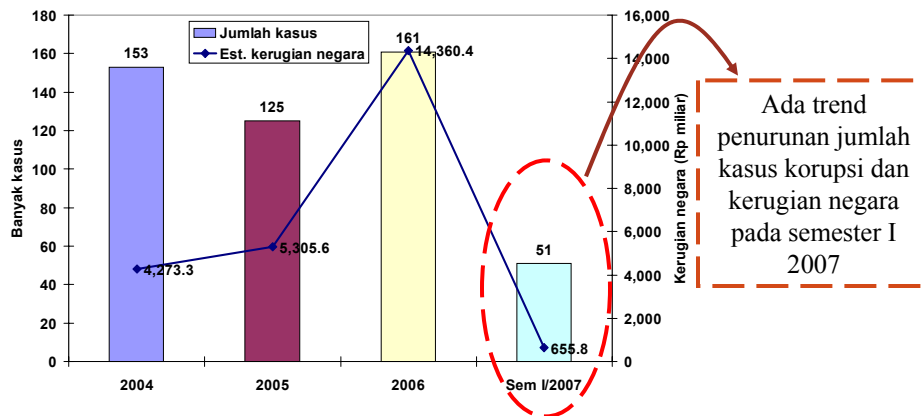
Mantan Menteri	(1 orang)
Dirjen	(1 orang)
Bupati dan Wakil Bupati	(4 orang)
Walikota	(1 orang)
Ketua/ Wakil Ketua DPRD	(3 orang)
Dirut/Direktur Swasta	(9 orang)



ANALISIS TREND KORUPSI

Analisis Trend Korupsi:

Perbandingan Dengan Kasus Korupsi Sebelumnya

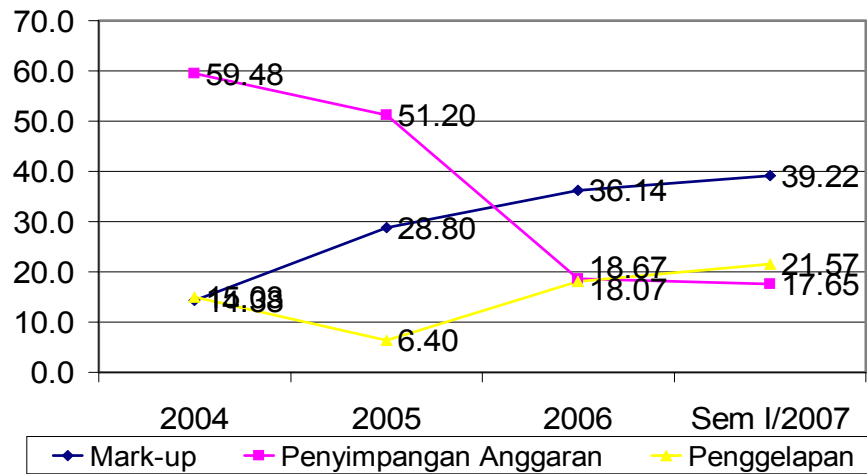


Ada trend penurunan jumlah kasus korupsi dan kerugian negara pada semester I 2007

Laju pengungkapan kasus korupsi baru : 73 kasus/semester

Laju kerugian negara : Rp 3,98 triliun /semester

Trend 3 Modus Korupsi Terbesar



Ada trend menurun pada modus penyimpangan anggaran dan trend meningkat pada modus mark-up. Sedangkan modus penggelapan dan penyuntan cenderung stabil

Trend Sektor Korupsi

Sektor	Tahun Pemantauan			
	2004	2005	2006	Sem I/2007
Pemerintah Pus/Drh serta Sekr. DPR/DPF	37.25	42.4	28.31	17.65
Sosial Masyarakat dan Keagamaan	9.8	4	2.41	13.73
Pertanian dan Peternakan	3.92	0.8	3.01	11.76
Telekomunikasi	1.96	3.2	2.41	7.84
Kehutanan dan Perkebunan	3.27	1.6	4.22	5.88
Kesehatan	3.92	4	1.81	5.88
Air Bersih	0.65	0.8	0	5.88
Perhubungan dan Transportasi	7.19	8	8.43	3.92
Energi dan Listrik	1.31	3.2	7.83	3.92
Perbankan	2.61	2.4	4.82	3.92
Peradilan	1.31	2.4	3.61	3.92
Koperasi dan UKM	0	0	0	3.92
Penelitian	0	0	0	3.92
Perumahan dan Pertanahan	5.88	5.6	10.24	1.96
Pemilu/Pilkada	7.19	8	5.42	1.96
Pariwisata	0	0	0	1.96
Hukum dan Perundang-undangan	0	0	0	1.96
Lainnya	13.73	13.6	17.47	0
Total	100	100	100	100

Trend Lembaga Tempat Korupsi

Lembaga	2004	2005	2006	Sem I/2007
Badan	1.31	0	0.6	13.73
BUMN/BUMD	8.5	6.4	29.52	10.78
Eksekutif	49.67	48.8	50	34.31
Komisi	1.96	8.8	4.82	1.96
Legislatif	31.37	24.8	10.24	20.59
Ormas/Parpol	2.61	0.8	0	2.94
Peradilan	0.65	0.8	1.81	0.98
Kepolisian dan Kejaksaan	0.65	0.8	1.81	0.98
Swasta	3.27	8.8	1.2	13.73
Jumlah	100	100	100	100

PROFIL KASUS KORUPSI
YANG DITANGANI APARAT
PENEGAK HUKUM (KPK,
KEJAKSAAN dan
KEPOLISIAN) SELAMA
SEMESTER I 2007

Profil Kasus Korupsi Yang Ditangani Selama Semester I/2007

132 Kasus Korupsi Baru Yang Ditangani Pada Semester I 2007

Rata-rata waktu pengungkapan : 2,2 tahun

Estimasi Kerugian Negara : Rp 7,9 triliun

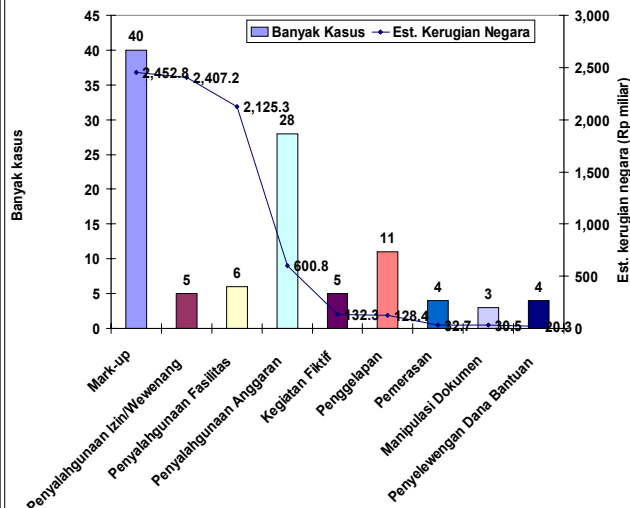
Modus terbanyak : Mark-up 49 kasus (37.10%)

Jumlah Pelaku : 323 orang

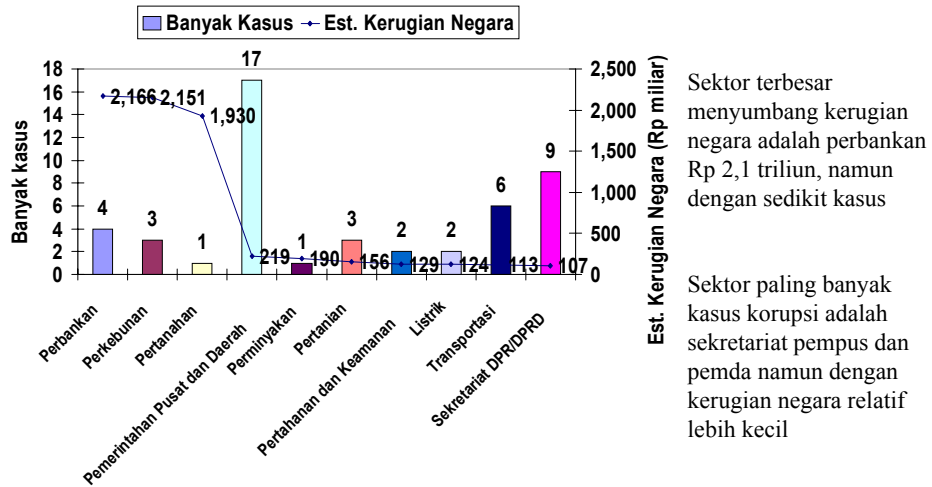
Sektor kasus terbanyak :

- Sekretariat Pemerintahan Pusat dan Daerah : 20 kasus (15.2%)
- Sekretariat Pemerintahan DPR/DPRD : 15 kasus (11.4%)

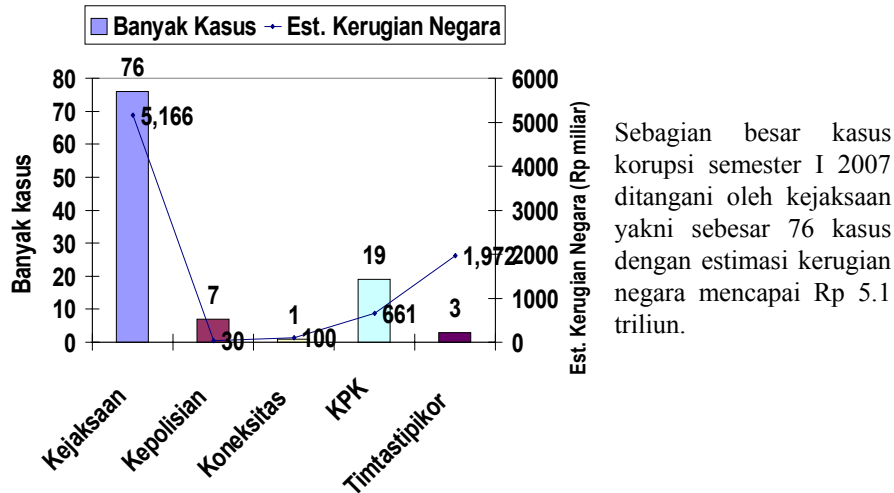
Modus dan Kerugian Negara Kasus Korupsi Yang Ditangani Aparat Penegak Hukum Semester I 2007



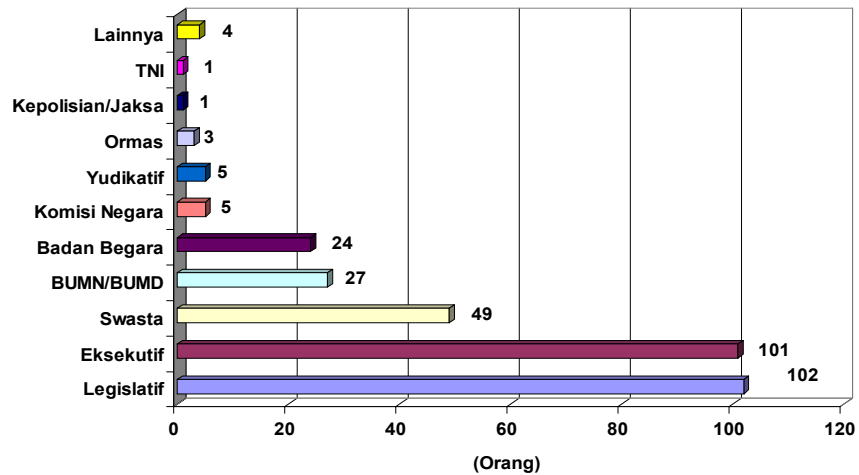
Sektor dan Kerugian Negara Kasus Korupsi Yang Ditangani Aparat Penegak Hukum Semester I 2007



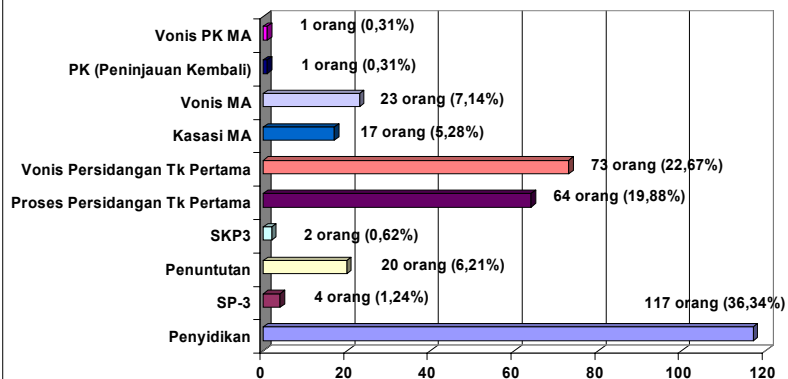
Banyak Kasus Korupsi Dan Kerugian Negara Semester I 2007 Menurut Lembaga Yang Menangani



Lembaga Asal Pelaku Korupsi Semester I 2007



Perkembangan Proses Hukum Pelaku Terkait Kasus Korupsi Semester I 2007



Kesimpulan

- Menurunnya jumlah kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak hukum juga mengalami penurunan. Hal ini karena pada saat yang bersamaan, kecenderungan jumlah penyimpangan dan kerugian negara yang ditemukan oleh BPK melalui hasil audit semester II 2006 justru mengalami peningkatan.
- Aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan belum mampu mencapai standar kinerja yang ditetapkan, mengingat waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus korupsi relatif lama, yakni 2,5 Tahun.

Kesimpulan

- Profil kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum tidak beranjak dari kasus korupsi konvensional di mana modus utama yang paling banyak ditemukan adalah penggelembungan harga (*mark-up*).
- Kasus korupsi di Perbankan relatif sedikit ditemukan jumlahnya, akan tetapi paling banyak menyumbang kerugian negara → Sektor perbankan merupakan target korupsi besar yang perlu diwaspadai secara lebih jauh oleh aparat penegak hukum.

Rekomendasi

- Aparat penegak hukum perlu menjalin kerjasama yang lebih kuat dengan auditor negara (BPK) sehingga tindak lanjut dari temuan penyimpangan audit atas penggunaan keuangan negara bisa dilakukan secara lebih cepat.
- Khusus untuk Jaksa Agung, perlu memperketat penerapan standar kinerja penanganan kasus korupsi sehingga pencapaian standar kinerja dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, mekanisme *reward and punishment* bagi para Kepala Kejaksaan terhadap pencapaian standar kinerja tersebut perlu ditegakan dan penerapannya harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat luas.

Rekomendasi

- Kapolri harus menyusun standar kinerja penanganan kasus korupsi -sebagai mana dimiliki Kejaksaan- supaya kinerja kepolisian dalam memberantas korupsi dapat dinilai dan diukur secara objektif. Hal itu sekaligus sebagai bahan penilaian untuk memberikan *reward and punishment* kepada Kepala-Kepala Kepolisian.
- KPK harus menerapkan fungsi koordinasi dan supervisi secara maksimal sehingga penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian dapat memenuhi standar kinerja yang diharapkan oleh masyarakat luas.
- Aparat penegak hukum perlu memprioritaskan penanganan korupsi pada sektor yang modusnya kian kompleks, seperti Perbankan mengingat nilai kerugian negara yang ditimbulkannya sangat besar. Hal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan pencapaian *asset recovery*.